

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD : Dinas Perkebunan
TAHUN ANGGARAN : 2026

PROGRAM	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
KODE PROGRAM	3.27.03
KEGIATAN	Penataan Prasarana Pertanian
SUB KEGIATAN	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian

ANALISIS SITUASI

1. **Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).**
 - a. Pembangunan sektor pertanian dan perkebunan di Kalimantan Timur memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas komoditas unggulan daerah serta mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya pekebun. Dalam kegiatan usaha perkebunan, baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang saling melengkapi dalam berbagai tahapan kegiatan, mulai dari budidaya, pemeliharaan tanaman, panen, hingga pengolahan hasil. Namun demikian, berdasarkan kondisi di lapangan, keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam perencanaan pengembangan prasarana, kawasan, dan komoditas perkebunan masih menunjukkan adanya perbedaan. Laki-laki umumnya lebih banyak terlibat dalam pengambilan keputusan, pengelolaan lahan, serta kegiatan yang berkaitan dengan akses terhadap sarana produksi dan prasarana perkebunan. Sementara itu, perempuan lebih banyak berperan dalam kegiatan operasional seperti pemeliharaan tanaman, panen, dan pengolahan hasil, namun masih memiliki keterbatasan dalam akses terhadap informasi, perencanaan program, serta pengambilan keputusan dalam kelompok tani atau kelembagaan pekebun. Selain itu, kepemilikan atau penguasaan lahan usaha tani umumnya tercatat atas nama laki-laki, sehingga perempuan seringkali tidak tercatat secara administratif sebagai penerima manfaat utama dalam program pembangunan perkebunan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan keterbatasan akses perempuan terhadap prasarana, kawasan pengembangan komoditas, serta dukungan program pemerintah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan sub kegiatan perencanaan pengembangan prasarana, kawasan, dan komoditas pertanian/perkebunan perlu dilakukan pengumpulan data pilah berdasarkan jenis kelamin, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan usaha perkebunan. Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan program yang lebih responsif gender, sehingga pembangunan sektor perkebunan dapat memberikan manfaat yang lebih merata bagi laki-laki dan perempuan serta mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekebun. Jumlah anggota kelompok tani perkebunan : - Laki-laki 1.157 orang (73,04%) - Perempuan : 427 orang (26,96%) Kepengurusan kelompok tani : - Ketua kelompok tani laki-laki : 93,83% - Ketua kelompok tani perempuan : 6,17% Kepemilikan/penguasaan lahan pertanian : - Atas nama laki-laki : 73,04% - Atas nama perempuan : 26,96%
2. **Isu dan Faktor Kesenjangan Gender**
 - a. **Faktor Kesenjangan :**
 - 1) Masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam keterlibatan pada proses perencanaan pengembangan prasarana, kawasan, dan komoditas pertanian/perkebunan, terutama dalam aspek akses terhadap informasi perencanaan program, partisipasi dalam forum perencanaan, kontrol terhadap pengambilan keputusan, serta manfaat dari pembangunan prasarana dan pengembangan kawasan komoditas. Beberapa faktor kesenjangan yang muncul dalam kegiatan perencanaan tersebut antara lain: Akses : Perempuan memiliki akses yang lebih terbatas terhadap informasi terkait perencanaan program pengembangan prasarana dan kawasan komoditas pertanian. Partisipasi : Keterlibatan perempuan dalam forum perencanaan seperti pertemuan kelompok tani atau musyawarah pembangunan masih relatif rendah dibandingkan laki-laki. Kontrol : Pengambilan keputusan terkait penentuan lokasi kawasan pengembangan, jenis komoditas unggulan, serta prioritas pembangunan prasarana lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Manfaat : Manfaat dari pembangunan prasarana pertanian dan pengembangan kawasan komoditas belum sepenuhnya dirasakan secara setara oleh perempuan yang juga terlibat dalam kegiatan usaha tani.
 - b. **Penyebab Internal :**
 - 1) Faktor internal adalah Penyebab yang berasal dari kondisi dalam kelompok tani atau masyarakat antara lain: 1. Struktur kepengurusan kelompok tani masih didominasi oleh laki-laki. 2. Kepemilikan atau penguasaan lahan pertanian/perkebunan sebagian besar tercatat atas nama laki-laki. 3. Perempuan memiliki keterbatasan waktu untuk terlibat aktif dalam kegiatan perencanaan karena tanggung jawab domestik. 4. Kapasitas dan akses perempuan terhadap informasi teknis perencanaan pertanian masih terbatas.
 - c. **Penyebab Eksternal :**
 - 1) Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari kebijakan, sistem, dan lingkungan di luar kelompok tani, antara lain : 1. Sosialisasi dan penyampaian informasi program pembangunan pertanian lebih sering ditujukan kepada pengurus kelompok tani yang didominasi laki-laki. 2. Mekanisme perencanaan program belum sepenuhnya mengakomodasi keterlibatan perempuan. 3. Program peningkatan kapasitas atau pelatihan teknis perencanaan lebih banyak diikuti oleh laki-laki. 4. Norma sosial dan budaya yang masih memandang laki-laki sebagai pengambil keputusan utama dalam usaha tani.

CAPAIAN PROGRAM

1. **Tolak Ukur**
Tujuan : Meningkatnya produksi komoditas tanaman perkebunan
 - a. Dalam pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perkebunan Rakyat (Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian) perlu memperhatikan faktor kesenjangan baik internal maupun eksternal agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara lebih inklusif dan memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam Meningkatkan produksi komoditas tanaman perkebunan
2. **Indikator dan Target Kinerja**
 - a. Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM

Rp. 651.558.400

RENCANA AKSI

Kegiatan 1	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perkebunan Rakyat (Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian)	
	Masukan	Rp. 651.558.400
	Keluaran	1. Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan perkebunan rakyat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 2. Tersusunnya data dan informasi potensi wilayah pengembangan komoditas perkebunan rakyat. 3. Tersusunnya dokumen atau rumusan perencanaan pengembangan prasarana, kawasan, dan komoditas perkebunan rakyat. 4. Teridentifikasi kebutuhan prasarana dan sarana pendukung pengembangan kawasan perkebunan rakyat
	Hasil	1. Terwujudnya perencanaan pengembangan prasarana dan kawasan komoditas perkebunan rakyat yang lebih terarah dan terintegrasi. 2. Meningkatnya sinergi dan keselarasan program pembangunan perkebunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. 3. Meningkatnya dukungan prasarana dan pengembangan kawasan komoditas unggulan perkebunan rakyat. 4. Meningkatnya efektivitas perencanaan program pembangunan perkebunan yang mendukung peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas.

Samarinda, 30 Maret 2026
Plt. Kepala Dinas


 Ahmad Muzakir, S.T., M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 197510012001121003